

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1. Metode Penelitian

#### 3.1.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik. Menurut Neuman (2003: 71) dalam Nurbaiti (2007:29), positivisme jika dilihat berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari aktivitas manusia. Sementara Sukardi (2003:72) dalam Nurbaiti (2007:30) mengemukakan bahwa positivistik yaitu pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi.

Neuman (2002: 82) mengemukakan bahwa pendekatan *Positivist* adalah:

*"An organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set probabilistic causal laws that can be used to predict general pattern of human activity."*

Artinya bahwa *positivist* merupakan suatu cara yang mengkombinasikan cara berpikir deduktif dengan observasi yang empirik dari perilaku individu untuk mencari tahu satu set kemungkinan yang dapat digunakan untuk menemukan suatu pola aktivitas. Menurut Bungin (2008: 32), *positivist* melahirkan pendekatan-pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial dimana objek penelitian dilihat memiliki keberaturan yang naturalistik, empirik dan *behavioralistik*, dimana semua objek penelitian harus direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu

mementingkan fakta sebagai makna namun mementingkan fenomena yang tampak serta bebas nilai.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena diarahkan untuk menguraikan evaluasi implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK. Penelitian deskriptif berfungsi untuk meneliti satu atau dua aspek dari sesuatu hal yang dipetakan secara umum dan luas menuju penelitian yang lebih khusus.

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran pun sangat beragam dan pilihan cara yang akan digunakan bergantung pada kebenaran yang ingin diperoleh. Kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran "intersubjektif", bukan kebenaran "objektif". Menurut Sugiyono (2006: 11) kebenaran intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama seperti budaya, dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia. Oleh karena itu dalam rangka mencari kebenaran tersebut, peneliti berusaha memperolehnya dari wawancara, dengan para pelaku pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan implementasi sistem teknologi informasi di MK.

### **3.1.2. Teknik Pengumpulan Data dan Informan**

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian lapangan. Dari teknik ini diperoleh data berupa pencatatan/rekaman *depth interview* dan pencatatan pengamatan terlibat/partisipatoris. Sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh bukan dari *interview* maupun pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan adalah:

#### **1. Dokumentasi**

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan

dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK seperti laporan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan lainnya, maupun data eksternal yang dikumpulkan dari pihak atau lembaga lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Observasi

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung mekanisme kebijakan dan penerapan sistem teknologi informasi di MK. Metode observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya.

## 3. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman dan catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung. Tujuannya adalah agar mempunyai kebebasan dalam menanyakan dan merumuskan butir-butir atau pokok-pokok yang tertera dalam pedoman wawancara sehingga dapat dengan leluasa menanyakan berbagai pertanyaan yang biasanya disertai dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan agar jawaban yang diberikan lebih lengkap dan jelas dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur pihak yang diharapkan dapat berperan sebagai informan, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- b. Kepala Biro Humas dan Protokol
- c. Ketua Uni Layanan Pengadaan.

d. Staf IT MK.

Semua informan yang dipilih tersebut adalah yang berdomisili dan/atau bertugas di Mahkamah Konstitusi. Jumlahnya bisa berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (informan) yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Dunn mengemukakan bahwa untuk mengevaluasi suatu kebijakan, maka dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Kebijakan Mahkamah Konstitusi tentang sistem teknologi informasi, dan implementasinya dievaluasi berdasarkan indikator-indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan.

Dari variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

<u>Evaluasi Kebijakan</u>	<u>Teknologi Informasi</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Efektivitas</u></li> <li>2. <u>Efisiensi</u></li> <li>3. <u>Kecukupan</u></li> <li>4. <u>Kesamaan</u></li> <li>5. <u>Responsivitas</u></li> <li>6. <u>Ketepatan</u></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI</b></p>

Tabel 2. Variabel Penilaian

Selain indikator di atas, penelitian ini juga melihat aspek lainnya, antara lain: kualitas pengelola sistem teknologi informasi MK, faktor-faktor kendala yang terjadi di lapangan, perubahan pola sistem kerja, adanya kompensasi dan lain sebagainya. Dalam melakukan suatu evaluasi, penulis menggunakan tipe evaluasi menurut William N. Dunn (2003: 429-438) mencantumkan kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah mengevaluasi penerapan sistem teknologi informasi di MK telah menghasilkan tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh oleh masyarakat secara online 24 jam.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah pelaksanaan persidangan di MK telah dilaksanakan secara modern dan efisien.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah kemudahan akses masyarakat dalam pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam kasus ini indikator yang digunakan untuk mengukur kesamaan atau perataan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem

dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi persidangan secara online.

5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh kebijakan STI Mahkamah Konstitusi telah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.
6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari kebijakan SI MK yang sudah dilaksanakan tersebut berguna bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator yang digunakan adalah menilai kebijakan sistem teknologi informasi MK yang telah dibangun dan dikembangkan telah memenuhi tujuan dari *e-government*.

No	Kriteria	Pertanyaan	Indikator E-Gov	Sumber Data	
				Primer	Sekunder
1	Efektivitas	Hasil yang diinginkan telah sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online	Wawancara	PMK, Kep Sekjen Laporan Kegiatan
2	Efisiensi	Pelaksanaan persidangan yang lebih efisien	Pelaksanaan persidangan yang modern dan efisien	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil telah menjadi solusi	Pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
4	Perataan	Manfaatnya telah didistribusikan dengan merata kepada masyarakat	Tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi secara online	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan telah memuaskan masyarakat	Telah dimanfaatkan STI MK oleh masyarakat	Wawancara	Surat Kabar Fakultas Hukum
6	Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan telah berguna	Penerapan e-government di MK	Wawancara	Akses Website Laporan Kegiatan

Tabel 3. Penjabaran Kriteria Evaluasi

### 3.1.3 Teknik Analisis Data

Dapat disimpulkan dalam penjelasan Neuman bahwa analisis data dalam pendekatan kualitatif lebih bersifat interpretatif. Artinya, data yang diperoleh dari *in depth interview* dan observasi akan diinterpretasikan, dicari keterkaitannya kemudian dibuat kesimpulan sementara. Sifat sementara dari kesimpulan dalam pendekatan ini bukan berarti penelitian ini belum berakhir melainkan bahwa hasil akhir dari

penelitian kualitatif ini harus bersifat terbuka untuk diverifikasi melalui penelitian penelitian sejenis.

Menurut Neuman (2003), analisis data merupakan pencarian pola data yang merupakan perilaku, objek, atau pengetahuan yang muncul berulang-ulang. Setelah ditemukan, pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam suatu teori sosial atau dalam keadaan ketika ia muncul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ilustratif (*the illustrative model*).

Neuman (2003:428) berpendapat bahwa model ilustratif menggunakan bukti-bukti empiris untuk mengilustrasikan atau menguatkan suatu teori. Metode ini diaplikasikan dalam situasi historis yang nyata atau kenyataan sosial; selain itu metode ini dipakai untuk mengatur data berdasarkan teori yang sudah ada (yang menjadi dasar penelitian atau alat analisis). Teori dasar memberikan 'kotak kosong' (*empty boxes*). Peneliti melihat apakah bukti-bukti bisa didapatkan untuk mengisi 'kotak kosong' tersebut. Bukti itu kemudian akan menguatkan atau menolak teori yang dipakai sebagai alat untuk menginterpretasikan dunia sosial. Teori yang dipakai bisa dalam bentuk model umum, analogi, atau urutan langkah. Metode analisis ini mempunyai dua variasi: yang pertama adalah untuk menunjukkan model teori memperjelas kasus atau situasi tertentu, Yang kedua adalah demonstrasi paralel model dengan kasus yang berbeda untuk menunjukkan bahwa teori dapat diaplikasikan dalam kasus yang berbeda-beda. Dalam kasus yang lain, teori dapat diilustrasikan dengan material khusus dari kasus-kasus yang berbeda-beda.

#### **3.1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan kekhususan penelitian di Sekretariat Jenderal MK. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Nopember 2008 sampai Juni 2009.

### **3.1.5. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dikhususkan pada pembahasan mengenai evaluasi implementasi kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK dalam mendukung peradilan MK yang modern dan terpercaya. Penelitian akan dibatasi pada lingkup yang menjadi dasar teori evaluasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian positivis dengan responden terkait dan terarah yaitu narasumber yang terlibat langsung dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK.